

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Badrulzaman Mariam Darus, Remy Sjahdeini Sutan, Soeprapto Heru, Djamil Faturrahman, Soenandar Taryana, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Harahap Yahaya, M 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Masjoen Sofwan S S, 1980, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Mertokusumo, S, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Pramono, N, 2001, *Restrukturisasi Perusahaan (Studi Kasus Restrukturisasi BUMN)*, Makalah Pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan IV, Bina Cipta, Bandung,
- Soekanto, S, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, R.H, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung

_____, 1987, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni Bandung

Tjager, I.N, 2000, *Restrukturisasi BUMN*, Makalah Seminar Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

B. Daftar Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Pelayaran*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang *Kepelabuhanan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang *Perusahaan Persero*.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang *Kepelabuhanan*.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang *Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*.